

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Berlandaskan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menjalankan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan

sumber dana yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah yaitu penerimaan pajak daerah, pentingnya sumber dana tersebut diperlukan usaha-usaha yang meningkatkan penerimaannya yaitu melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengumutannya. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya dilapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pengumutan pajak (Halim, 2014). Upaya untuk peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Menurut Pratama dan Suartana (2014) upaya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan intensifikasi. Salah satu intensifikasinya adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dimana potensinya dimungkinkan untuk dipungut pajak, sarana dan prasarana wilayah serta kualitas pembangunan yang berorientasi pada pemerataan perlu adanya untuk ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan agar sumber dana dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah selain mengetahui pula tingkat efesiensi penerimaan pajak daerahnya. Efesiensi dapat dihubungkan dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan target yang diharapkan (Pratama dan Suartana, 2014).

Desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah otonom memberikan kesempatan bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan, mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki (Pepinsky dan Wihardja, 2016). Melalui hal tersebut diharapkan agar pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian daerah.

Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Hartoyo, 2014). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan dalam APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan lahan bagi daerah untuk memperoleh dana dalam membiayai kegiatan publiknya, tapi yang terjadi saat ini PAD masih merupakan penyumbang terkecil dalam hal pendanaan daerah.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat dalam

Kurniansah, 2014). Parawisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya parawisata, maka suatu negara tersebut akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata tersebut. Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota Perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan budayanya. Hingga sekarang Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang dikenal di Indonesia dan Mancanegara (Buku Kepariwisataaan DIY, 2014). Berbagai macam objek wisata yang ditawarkan oleh Kota Yogyakarta, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata minat khusus dan wisata belanja. Obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak dan bervariasi. Keharmonisan antara wisata alam, wisata budaya dan wisata modern dapat terjaga dengan harmonis. Dengan kesungguhan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan, maka keberadaan kemegahan candi Prambanan dan Ratu Boko, Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kota Tua, Makam Raja-raja Mataram, Kota Gedhe, Museum, dan Adat-istiadat serta kesenian tradisionalnya dll, sampai sekarang masih terjaga/lestari. Begitu juga dengan potensi keindahan alam daerah Yogyakarta yang tidak kalah mempesona, seperti kawasan Kaliurang dan gunung Merapi, puncak Suroloyo/bukit Menoreh, gunung Gambar, pegunungan Karst, Gumuk Pasir, Desa Wisata,

maupun keindahan pantai selatan seperti pantai Kukup, Baron, Krakal, Kukup, Siung, Parangtritis, Ngrehnan, Sundak, Sadeng dll, (Buku Kepariwisataaan DIY, 2010).

Parawisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Wahab dalam Kurniansah, 2014). Sektor parawisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi parawisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Sektor parawisata merupakan hal yang kompleks dan unik, karena parawisata bersifat multidimensi baik fisiksosial, ekonomi, politik, dan budaya. Parawisata menawarkan beragam jenis wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam jenis wisata yang yang diminati oleh masyarakat. Menurut Salah Wahab dalam bukunya” *Tourism Management*” parawisata adalah salah satu jenis industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Karena dalam proses penyediaan lapangan kerja, standar hidup bagi sektor-sektor produktivitas sangat diminati oleh masyarakat sebagai sektor yang

kompleks, parawisata juga menyediakan industri klasik yang meliputi industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi yang ekonomis yang dipandang sebagai industri.

Untuk merealisasikan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan finansialnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin (2015) serta Sijabat (2016) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia cenderung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama dari segi pendapatan asli daerahnya perkembangan parawisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan parawisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Secara tidak langsung menimbulkan permintaan modal barang dan barang dan bahan baku (*investmen derived Demand*). Dalam usaha untuk memenuhi permintaan wisatawan diperlukan sarana dan prasarana dibidang transport dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, resto dan lain-lain.

Parawisata dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya, dari sudut sosial bahwa kegiatan parawisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan keparawisataaan. Segi ekonomi bahwa kegiatan parawisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari pada wisatawan mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Seni budaya dalam parawisata merupakan sarana untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan daerah tujuan wisata.

Sejalan dengan hal tersebut dampak parawisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal menjadi delapan kelompok besar, yaitu: dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Majunya industri parawisata suatu daerah sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus d tunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata

(DWT) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Suatu pariwisata apabila dikembangkan secara tepat akan berdampak positif bagi wisatawan maupun komunitas yang menyediakan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan wisata. Dengan pendapatan yang bertambah, pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas sehingga wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata nasional tentu tidak lepas dari wisata lokal yang ada pada daerah.

Secara letak/lokasi Provinsi DIY terletak dibagian yang strategis berada di tengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Timur dan di bagian selatan Jawa Tengah yang memungkinkan para wisatawan untuk berkunjung. Dilihat dari kondisi topografi di DIY beraneka ragam, mulai dari berbentuk dataran, lereng pegunungan serta daerah pantai. Pada tahun 2010-2016 jumlah PAD sektor pariwisata DIY selalu mengalami peningkatan. Industri pariwisata di DIY mulai tahun 2012 berkembang pesat terlihat bahwa PAD sektor pariwisata DIY meningkat pesat di tahun 2012 hingga tahun 2016. Proporsi PAD Sub

Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta terhadap proporsi total PAD Sub Sektor Pariwisata DIY, Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama dari 5 Kabupaten/Kota di DIY dengan rata-rata sebesar 49%. Kemudian diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo dengan proporsi terkecil yaitu rata-rata 1%. Sektor pariwisata DIY yang terus berkembang membawa dampak pada Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar PAD yang dihasilkan suatu daerah dapat memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Tabel 1.1

## Jumlah Obyek Wisata DIY Tahun 2011-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	18	18	18	18	18	16	32
Bantul	8	8	8	8	52	29	32
Gunung Kidul	9	18	18	18	18	35	55
Sleman	34	63	63	63	63	55	58
Yogyakarta	23	23	25	25	25	23	43
Total	92	130	132	132	176	135	182

*Sumber: Badan Pusat Statistika*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah obyek wisata di DIY pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, terjadi penambahan obyek wisata yang signifikan terjadi di Kabupaten Bantul. Sedangkan pada tahun 2016, data menunjukkan penurunan obyek wisata di DIY. Jumlah obyek wisata menjadi penting bagi tergeraknya perekonomian masyarakat. Karena, dengan adanya obyek wisata di suatu daerah mampu menciptakan ruang untuk berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks keparawisataan, jumlah pengunjung menjadi faktor yang sangat penting. Jumlah pengunjung tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di suatu daerah wisata karena menjadi sumber perputaran uang yang mengakibatkan permintaan akan kebutuhan parawisata bahkan, jumlah kunjungan bisa menjadi indikator kesuksesan sektor parawisata.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Restoran Provinsi DIY**  
**Tahun 2011-2018**

Kabupaten/ kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon progo	30	45	55	67	69	71	75
Bantul	32	40	45	48	54	58	67
Ginung Kidul	39	45	48	55	57	63	66
Sleman	97	101	107	109	137	139	145
Yogyakarta	200	239	253	320	379	481	484
Total	398	470	508	599	696	812	837

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah restoran di DIY pada tahun 2011-2017 terjadi penambahan Restoran yang signifikan terjadi di DIY dipengaruhi dengan bertambahnya Obyek wisata disetiap tempat.

**Tabel 1.3****Jumlah Hotel di Provinsi DIY Menurut Kabupaten/Kota tahun 2011-2017**

Kabupaten/ kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon progo	20	26	26	27	26	26	24
Bantul	271	285	287	249	262	266	254
Gunung Kidul	52	63	66	71	70	70	75
Sleman	393	394	389	392	389	386	390
Yogyakarta	368	386	402	399	419	417	438
Total	1.104	1.154	1.170	1.399	1.166	1.165	1.181

*Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi DIY*

Tabel 1.3 di atas menunjukkan jumlah hotel di Provinsi DIY di masing-masing kabupaten cukup. Penurunan jumlah hotel di masing-masing kabupaten terjadi dalam waktu yang variatif atau tidak terjadi dalam waktu yang sama secara bersama. Secara relatif, Kota Yogyakarta memiliki jumlah hotel terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lain. Sementara jumlah hotel terendah dimiliki oleh kabupaten Kulon Progo.

Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DIY terhitung cukup besar. Menurut data yang di ambil dari buku statistik keparawisataan Provinsi DIY, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata diambil dari 5 sumber, yaitu pajak hotel, dan restoran, pajak tontonan/hiburan, retrebusi obyek dan

daya tarik wisata, retrebusi perijinan usaha parawisata, retrebusi penggunaan aset milik pemerintah daerah (sewa/kontrak/bagi hasil).

Berikut data PAD sektor parawisata DIY:

**Tabel 1.4**  
**Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Parawisata Provinsi DIY**  
**Tahun 2011-2017**

	Tahun (jutaan)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon progo	1.177.811	2.110.851	2.646.017	2.544.115	3.420.774	4.004.004	5.323.777
Bantul	7.399.158	12.529.648	14.533.810	16.046.010	18.281.320	21.901.264	17.774.915
Gunung Kidul	2.309.007	8.478.767	8.168.857	17.415.250	24.107.810	28.397.385	32.758.748
Sleman	38.943.756	53.194.912	68.632.180	84.780.220	104.985.100	137.152.070	180.915.050
Yogyakarta	56.368.254	76.842.342	94.840.260	116.146.900	116.146.900	162.390.760	186.241.780
Total	106.197.986	153.156.520	188.821.124	236.932.550	266.941.971	162.390.760	423.014.270

Sumber: *Badan Pusat Statistika Provinsi DIY*

Pada tabel 1.4 menunjukkan tren positif PAD sektor parawisata provinsi DIY di hampir masing masing Kabupaten/Kota. PAD sektor parawisata terus menerus mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 yang mengalami penurunan sebesar 3,9% dari tahun sebelumnya. Desentralisasi fiskal akibat dilakukannya otonomi daerah juga membawa dampak nilai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dipacu oleh penerapan otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah harus mampu menggali potensi daerahnya sendiri guna membiayai pengeluaran - pengeluaran yang dilakukan daerah tersebut.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan retribusi obyek yang diterima daerah tersebut. Pendapatan obyek pariwisata ini akan menyumbang ke pendapatan daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba dari perusahaan daerah, pajak perhotelan, pajak hiburan, penerimaan dari dinas dan pendapatan asli yang sah. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Obyek Pariwisata di Provinsi DIY. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap obyek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi obyek wisata di Provinsi DIY agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Selain sebagai Sumber pendapatan devisa, pariwisata juga memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja, kegiatan produksi dan pembangunan infrastruktur. Pariwisata juga berpotensi mendorong peningkatan penerimaan negara dari pajak, terutama pajak

tidak langsung. Meskipun beragam kontribusi parawisata terhadap perekonomian telah disadari sejak lama namun sejauh ini penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mengenai pendapatan asli daerah sektor parawisata belum mendapat porsi yang cukup besar di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pleanggara, 2012), tentang jumlah obyek parawisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retrebusi obyek parawisata di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Penelitian yang di lakukan (Aydin, 2016) menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan wisatawan di Turki.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Austriana, 2005) tentang analisis faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor parawisata di Jawa Tengah menemukan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel berbintang dan melati, jumlah sarana angkutan serta jumlah pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah, dan jumlah obyek wisata, berpengaruh negative terhadap Kopertis Wilayah X.

Dalam penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu daerah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian pada daerah wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo terhadap Pendapatan Asli Daerah pada sektor Parawisata. Karena

dalam sektor parawisata masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan parawisata tersebut dengan mendukung pemerintah daerah merancang suatu strategi untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut, dengan demikian para wisatawan dapat berwisata dengan nyaman dan aman, bahkan dengan adanya seperti itu maka pendapatan asli daerah semakin bertambah sehingga masyarakat hidup semakin sejahtera.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Parawisata Provinsi DIY Tahun 2013-2018.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY?
2. Apakah pajak rumah makan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY?
3. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY?

#### **C. Batasan Masalah**

1. Penelitian dilakukan terhadap retribusi Obyek Wisata diprosikan jumlah obyek wisata Provinsi DIY 2011-2018.
2. Penelitian dilakukan terhadap Pajak Restoran diprosikan jumlah restoran di Provinsi DIY 2011-2018.

3. Penelitian dilakukan terhadap pajak hotel diprosikan jumlah hotel ada di Provinsi DIY tahun 2011-2018.

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Provinsi DIY.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Provinsi DIY.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian tentang pengetahuan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
  - b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya sebagai penerapan ilmu teori-teori yang didapatkan dalam bangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi maupun dasar acuan yang valid terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi DIY, khususnya di Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga. Kebijakan ini diharapkan pula dapat menjadi awal dari usaha optimalisasi potensi pariwisata di Provinsi DIY sehingga DIY dapat menjadi destinasi wisata yang lebih berkualitas dan dapat bersaing.

### b. Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku langsung di lapangan, sudah pasti membutuhkan informasi, khususnya adalah mengenai parawisata di daerahnya. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dari berbagai sudut pandang, sehingga sinergitas masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dapat terjalin, lebih jauh lagi adalah masyarakat mampu memanfaatkan potensi parawisata di daerahnya untuk memajukan ekonomi baik secara pribadi maupun untuk daerah.

## **F. Kerangka Penulisan**

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan yang berupa rincian dari tiap bab.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan penulis dalam melakukan pengembangan hipotesis yang dapat dipergunakan sebagai pembanding atau acuan di dalam pembahasan penelitian.

### **3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian, materi penelitian dan langkah-langkah penelitian.

### **4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dalam pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak terpecah menjadi sub bab tersendiri.

### **5. BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian.